

# PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI

*Jufrin, Kasmar, & Nasrullah*

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Jl. Anggrek No.16 Ranggo Kel. Nae Kec. Rasa Nae Barat Kota Bima

*Email: jufrin@stihmuh-bima.ac.id & kasmar@stihmuh-bima.ac.id*

## **Abstrak**

Eksistensi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula dalam hukum perdata bisnis dan perbankan sebagai bagian dari hukum perdata dan bisnis maka perlindungan hukum kepada para nasabah bank mutlak dan sangat diperlukan, sebagai media atau sarana usaha di bidang keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam dana dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dunia perbankan sangat rentan dengan berbagai resiko yaitu antara lain yang datang dari pihak bank yang berimbas pada nasabah bank, misalnya yang dikenal dengan likuidasi perbankan, perjalanan usaha perbankan tidaklah selalu sehat dan menguntungkan akan tetapi dalam praktek terdapat pula bank yang tidak sehat dan tidak mampu melaksanakan aktivitasnya secara baik dan sehat sebagaimana diharapkan, maka dalam hal ini pihak pemerintah yang diwakili Bank Indonesia melakukan merger dan likuidasi bank yang bermasalah tersebut. Dengan adanya likuiditasi bank tersebut seyogianya dapat memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah bank yang dikuiditasi agar modal dan hak haknya dapat terjaga dan terlindungi secara hukum.

**Keywords:** *Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Likuidasi.*

## **Pendahuluan**

Eksistensi dunia usaha dan bisnis adalah mutlak diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Dalam hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah di bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas.

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin bertambah banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.

Pihak bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan modal, uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, Bank dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik rasa simpati masyarakat, seyoganya pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakannya pada bank, karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut berikut bunganya. Sedangkan bagi paranasabah harus memahami benar bank yang bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh bunga yang tinggi, bonus atau hadiah dan lainnya, jika ternyata bank yang dipercaya tersebut memiliki kondisi yang kurang baik. Namun dari semua itu yang terpenting adalah bagaimana usaha perbankan nasional melaksanakan komitmennya secara konsisten, profesional dan transparan. Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak untuk membangun kembali kepercayaan terhadap dunia perbankan nasional.

Bank Indonesia selaku bank sentral dituntut untuk cermat terhadap kondisi kesehatan bank-bank yang ada di Indonesia, karena jika kondisi suatu bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dunia perbankan. Maka bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham

menambah modal, mengganti dewan komisaris dan direksi bank juga menghapus kredit dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, merger atau konsolidasi dengan bank lain yang bersedia mengambil alih beserta seluruh kewajibannya. Langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas dilakukan untuk mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dengan adanya bank-bank yang sakit membuat pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi “likuidasi” bank-bank yang sakit tersebut, karena bank-bank yang sakit tersebut dapat dikhawatirkan akan membahayakan perekonomian bangsa. Kebijaksanaan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi peredaran uang dan itu dapat merugikan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana.

Arti nasabah pada lembaga bank perbankan sangat penting. Nasabah itu barak nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyak agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya di salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank. Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya *“Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank”* yang di kutip dari *“kamus perbankan”* menyatakan bahwa *“Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”*. (Saladin, 1994). Komaruddin dalam *“kamus perbankan”* menyatakan bahwa *“nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”* <sup>1</sup> Pengertian nasabah dalam perbankan umum adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Komaruddin, 1994, *Kamus Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta Indonesia hal. 20.

<sup>2</sup>Kasmir. 2002. *Dasar-dasar perbankan*, CV. ARMICO. Bandung: Indonesia, hal 8

Kerugian tersebut ditanggung oleh bank yang bersangkutan, yang akhirnya bisa ditanggung kreditur maupun nasabah. Ada kemungkinan hak nasabah dari bank tersebut masih ada, sehingga tidak serta merta bank yang bersangkutan bubar. Hak dan kewajiban yang masih ada tersebut misalnya berupa kredit yang masih berjalan, belum defalut, dan tidak tercapai jalan keluar lain seperti pengalihan ke bank yang lain, atau karena ada stand by L/C atau garansi bank belum jatuh tempo. Dalam hal bank dilikuidasi pemilik bank harus mempunyai aset yang cukup, untuk membayar kewajibannya dan juga harta pribadi pemilik bank dapat diambil alih untuk mempertanggung jawabkan. Apabila aset tidak memenuhi untuk pelunasan kewajiban bank, maka uang nasabah yang tersimpan pada bank yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi pada pemiliknya yang dalam hal ini adalah nasabah penyimpan dana. Jadi uang nasabah tersebut dianggap hangus atau hilang bersamaan dengan habisnya aset bank yang terkena likuidasi tersebut.

Bahwa Bank yang dilikuidasi membuat sebagian masyarakat khawatir akan keberadaan dana simpanannya itu akan kembali atau bahkan hilang. Hal itu tidak lain karena banyak dari masyarakat hanya tahu menabung, berbunga, lalu mereka menariknya kembali, dengan tidak mengetahui hak-haknya sebagai penyimpan dana. Banyaknya dana yang dapat dihimpun oleh bank dari masyarakat identik dengan banyaknya nasabah bank, maksudnya bahwa semakin banyak bank yang dapat menarik nasabah, maka bank akan mendapat dana yang semakin besar pula. Oleh karena itu banyak masyarakat menjadi nasabah bank, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, sebab tidak ada kemungkinan bank tempat menyimpan dana tersebut mengalami kondisi yang tidak baik dan harus dilikuidasi.

Berdasarkan Pendahuluan/latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang relevan untuk dibicarakan dan dibahas di dalam penulisan penelitian hukum ini adalah “Bagaimana kedudukan nasabah bank dalam prioritas pembayaran, tanggung jawab bank terhadap adanya likuidasi dan Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada nasabah bank dalam likuidasi.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian inventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai *literature* yang ada. Dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

Sedangkan Analisis data yang dilakukan sebagai bahan hukum adalah merupakan dengan cara mengumpulkan seluruh bahan-bahan hukum, setelah isu penelitian telah ditetapkan, begitu isu hukum sudah ditetapkan peneliti melakukan

---

<sup>3</sup>. Irwansyah, (2021) *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal 133-152

penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

### Hasil dan Pembahasan

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang disebut banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan *bank* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kamus besar bahasa Indonesia, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>5</sup> Sedangkan istilah perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank.<sup>6</sup> Berdasarkan kutipan penulis dalam Blacks Law Dictionary bank dirumuskan sebagai *"an istitution usually incopated, whose business to receive, money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes"*<sup>7</sup> Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menurut pasal 4

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal 237

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 78.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Hermansyah, 2009, *Hukum perbankan nasional Indonesia*, Edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Indonesia. Hal. 7.

ayat 1-3 yaitu : Bank Indonesia adalah bank Sentral Republik Indonesia (sebuah badan keuangan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil) UU RI NO.3 TAHUN 2004. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang indenpenden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di atur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah islam. Dalam perdangan islam ada dua konsep yaitu:

1. Larangan atas penerapan riba (bunga yang dibungakan)
2. Sebagai penggantian dipakai sistem bagi hasil

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

---

<sup>8</sup> Suhardi, G.(2003) *usaha perbankan dalam perspektif Hukum*.Cetakan V. Penerbit Kanisius. Yogyakarta: hal 21.



masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit (pinjaman) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) saat ini ada sekitar 128 bank di Indonesia. Adapun Jenis-jenis bank dapat diuraikan antara lain :

1. Bank Sentral
2. Bank umum konvensional
  - a) Bank swasta
  - b) Bank swasta nasional devisa
  - c) Bank swasta nasional nondevisa
  - d) Bank pembangunan daerah
  - e) Bank campuran
  - f) Bank asing
3. Bank umum syariah
  - a) Bank swasta nasional
  - b) Bank swasta nasional nondevisa
  - c) Bank campuran
4. Unit usaha syariah bank umum konvensional
  - a) Bank pemerintah
  - b) Bank swasta nasional devisa
  - c) Bank pembangunan daerah
  - d) Bank asing
5. Bank perkreditan rakyat
6. Bank yang telah berhenti beroperasi

Berdasarkan status atau kedudukannya maka dikenal jenis bank sebagai berikut :

1. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh bank sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini adalah daftar bank pemerintah : Bank Mandiri (sebelum 1998 adalah bank dagang negara), Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bank Pembangunan Indonesia. Mutiara Bank (sebelum tanggal 16 September 2009 bernama "Bank Century"/"CIC", penyertaan

saham sementara oleh Pemerintah Indonesia melalui LPS), Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara;

2. Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta nasional dibedakan menjadi dua bagian :

a) Bank swasta nasional devisa, yang terdiri dari ; Bank BRI Agroniaga, sebelum dikenal sebagai "bank agroniaga", Bank Anda (surabaya), sebelumnya dikenal sebagai "bank antar daerah", Bank Artha Graha Internasional, sebelum bulan mei 2005 bernama "bank interpacific", Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank Capital Indonesia, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, sebelum tanggal 15 oktober 2008 bernama "bank niaga" dan "bank lippo", Bank Danamon Indonesia, Bank Ekonomi Raharja, Bank Ganesha, Bank Hana, sebelum tanggal 17 maret 2008 bernama "bank bintang manunggal", Bank Himpunan Saudara 1906 (bandung), Bank ICBC Indonesia, sebelumnya bernama "bank halim indonesia", Bank Index Selindo, Bank Maybank Indonesia, sebelumnya bernama "bank internasional indonesia", Bank Maspion (surabaya), Bank Mayapada, Bank Mega, Bank Mestika Dharma (medan), Bank Metro Express, Bank MNC Nasional, sebelum tanggal 27 oktober 2014 bernama "bank ICB bumiputera"/sebelumnya bernama "bumi putera indonesia", Bank Nuasantara Parahyangan (bandung), Bank OCBC NIPS, sebelum tanggal 7 februari 2011 bernama bank NISP" , Bank Off India Indonesia, sebelum tanggal 17 november 2011 bernama "bank swadesi", Panin Bank, Bank Permata, sebelum tanggal 18 oktober 2002 bernama "bank bali", Bank QBN Kesawan, sebelum tanggal 12 desember 2011 bernama "bank kesawan", Bank SBI Indonesia,

sebelum tanggal 30 april 2009 bernama “bank indo momex”, Bank Sinarmas, sebelumnya bernama “bank shinta indonesia”, Bank UOB Indonesia, sebelum tanggal 19 mei 2011 bernama “bank UOB Buanan”/ sebelumnya bernama “bank buana indonesia”

- b) Bank swasta nasional non devisa antara lain ; Anglomas Internasional Bank (surabaya), Bank Andara, sebelum tanggal 30 januari 2009 bernama “bank sri partha”, Bank Artos Indonesia (bandung), Bank Bisnis Internasional (bandung), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (bandung), Centratama Nasional Bank (surabaya), Bank Sahabat Sampoerna, Bank Fama Internasional (bandung), Bank Harda Internasional, Bank Ina Perdana, Bank Jasa Jakarta, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Dinar Indonesia, Bank Mayora, Bank Mitraniaga, Bank Multi Arta Sentosa, Bank Nationalnobi, sebelum tanggal 12 november 2008 bernama “bank alfindo sejahtera”, Prima Master Bank, Bank Pundi Indonesia, sebelum tanggal 23 september 2010 bernama “bank esksekutif internasional”, Bank Royal Indonesia, Bank Sahabat Purba Danarta (semarang), sebelum tanggal 16 september 2009 bernama “ bank purba danarta”, Bank Sinar Harapan Bali, Bank Victoria Internasional, Bank Yudha Bakti

Bank pembangunan daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Bank BPD Aceh (banda aceh)
2. Bank Sumut (medan)
3. Bank Nagari (padang)
4. Bank Riau Kepri (pekan baru), dahulu dikenal sebagai bank riau
5. Bank Jambi (jambi)
6. Bank Bengkulu (kota bengkulu)

7. Bank Sumsel Babel (palembang), dahulu dikenal sebagai bank sumsel
8. Bank Lampung ( bandar lampung)
9. Bank DKI (jakarta)
10. Bank BJB (bandung), dahulu dikenal sebagai bank jabar atau bank jabar banten atau BPD jawa barat
11. Bank Jateng (semarang)
12. Bank Kalbar (pontianak)
13. Bank Kalteng (palangka raya)
14. Bank Kalsel (banjarmasin)
15. Bank Kaltim (samarinda)
16. Bank Sulsel (makassar)
17. Bank Sultra (kendari)
18. Bank BPD Sulteng (palu)
19. Bank Sulut (manado)
20. Bank BPD Bali (denpasar)
21. Bank NTB (mataram)
22. Bank NTT (kupang)
23. Bank Maluku (ambon)
24. Bank Papua (jayapura), dahulu dikenal sebagai BPD Jayapura

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam yang terdiri dari :

1. Bank swasta nasional devisa (Syariah)
  - a) Bank BNI Syariah
  - b) Bank Mega Syariah
  - c) Bank Muamalat Indonesia
  - d) Bank Syariah Mandiri
2. Bank swasta nasional non devisa (Syariah)

- a) Bank BCA Syariah, dahulu bernama “bank IUB”
  - b) Bank BJB Syariah
  - c) Bank BRI Syariah, dahulu bernama “bank persyarikatan indonesia”
    - b. Bank Victoria Syariah, dahulu bernama “bank swaguna”
3. Bank Campuran (Syariah)
- a) Bank Maybank Syariah Indonesia, dahulu bernama “ bank maybank indocrop”
  - b) Bank of Amerika (Bofa)(NYSE:BACTYO 8648, Bankofamerica.com *kantor pusat Charlotte, Carolina Utara*)
- Unit usaha syariah bank umum konvensional dilakukan juga oleh Bank pemerintah, Bank BTN Syariah, Bank swasta nasional devisa (syariah konvensional) ; Bank Danamon Syariah, CIMB Niaga Syariah, BII Syariah, OCBC Permata Syariah dan Bank Pembangunan Daerah (syariah) yaitu ; Bank Nagari Syariah, Bank BPD Aceh Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Sumut Syariah dan Bank Kaltim Syariah.
4. Bank perkreditan rakyat (BPR)
- BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Per tanggal 18 Desember 2011, terdapat 1.683 BPR yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Secara kuantitas cukup banyak bank di Indonesia yang diberhentikan, merger, di cabut ijinnya dan Bank yang telah berhenti beroperasi adalah dapat diuraikan sebagai berikut yaitu antara lain ; American Express Bank (dicabut izin usaha sejak tanggal 24 Februari 2009), dan (merger dengan bank Interpacific, bank arta niaga kencana

(merger dengan bank commonwealth sejak tanggal 10 Desember 2007), Arta media bank (merger dengan bank permata), bank asia pasifiak dan bank asiatic (ditutup sejak tanggal 8 April 2004), bank bahari, bank bardays Indonesia (dicabut izin usaha sejak tanggal 7 Juli 2011, dahulu bernama "Bank Akita"), bank dagang bali (ditutup sejak tanggal 8 April 2004), bank dai Ichi kangyo Indonesia (merger dengan bank mizoho Indonesia), bank danpac (merger dengan Bank CIC, bank dharmala (merger dengan bank danamon), (dicabut izin usaha sejak tanggal 1 September 2009, menjadi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia), bank vicorinvest, bank global International (ditutup sejak tanggal 13 Januari 2005), dan (merger dengan bank rabobank International Indonesia sejak tanggal 24 Juni 2008), bank hagakita (merger dengan bank rabobank International Indonesia sejak tanggal 24 Juni 2008), (merger dengan bank mizoho Indonesia) (dicabut izin usaha sejak tanggal 17 April 2009) (ditutup sejak tanggal 6 Oktober 2004), bank Intan, (merger dengan bank danamon), keppet tat lee buana bank (merger dengan bank OCBC NISP lama kemudian berubah menjadi Bank OCBC Indonesia), Lippo Bank (merger dengan bank CIMB niaga sejak tanggal 15 Oktober 2008), bank Mashil, bank merincorp (ditutup sejak tanggal 7 Agustus 2003), bank metropolitan, Bank Modern, bank nusa nasional (merger dengan bank danamon), bank OCBC Indonesia (merger dengan bank OCBC NISP sejak tanggal 7 Februari 2011), bank papan sejahtera, Bank paribas BBD Indonesia (ditutup sejak tanggal 5 Februari 2011, berhenti operasional dan bergabung dengan Bank PNB Paribas Indonesia), bank patriot (merger dengan bank permata), bank pelita, bank pikko (merger dengan Bank CIC), bank pos nusantara (merger dengan bank danamon), bank prasidha utama (ditutup sejak tanggal 20 Oktober 2000), prima ekspres bank (merger dengan danamon), bank putera

multikarsa, bank rama (merger dengan bank danamon), bank ratu (ditutup sejak tanggal 20 Oktober 2000), bank risjad salim Internasional (merger dengan bank danamon), bank sakura swadharma (merger dengan bank sumitomo mitsui Indonesia), bank sociate generale Indonesia (ditutup sejak tanggal 25 April 2003), bank suma, bank tamara dan bank tiara (merger dengan bank danamon), Bank tata, bank tiara (merger dengan bank danamon), tokai lipso bank (merger dengan bank UFJ Indonesia), bank UFJ Indonesia (dicabut izin usaha sejak tanggal 5 Oktober 2006, operasional bergabung dengan the bank of tokyo UFJ dan bank UOB Indonesia (merger dengan bank UOB Buana sejak tanggal 10 Juni 2010), bank umum nasional, bank unibank (ditutup sejak tanggal 29 Oktober 2001), Bank Universal (merger dengan bank permata), bank windu kentjana (merger dengan Bank Multicor sejak tanggal 18 Desember 2007)

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan dasar bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU no. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata dan tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Akan tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting

dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang - undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang - undangan lain yang terkait. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Rasio diundangkannya UUPK yaitu dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum perlindungan terhadap konsumen yaitu dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsumen jasa dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan sebutan *nasabah*, dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murah, dan sebagainya, ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C). Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum



bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai klausula baku. Dari peraturan perundang - undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pencantuman klausul-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya.

Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud. Adanya kondisi demikian, melatar belakangi UUPK memberikan pengaturan mengenai klausula baku, yaitu sebagai berikut : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Amanat sebagaimana dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan/penagihan piutang, pelunasan hutang dan penyelesaian sisa harta hutang diantara para pemilik. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Rasio likuiditas antara lain terdiri dari: Current Ratio : adalah membandingkan antara total aktiva lancar dengan

kewajiban lancar. Quick Ratio: adalah membandingkan antara (total aktiva lancar – inventory) dengan kewajiban lancar.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank (“PP No. 25/1999”), Likuidasi Bank didefinisikan sebagai berikut: *“Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.”*<sup>9</sup> Adapun pelaksanaan likuidasi bank dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi. Hal mana ditegaskan secara detail dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 25/1999, yaitu : *“Pelaksanaan likuidasi bank wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuknya Tim Likuidasi.”* Berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank tersebut, maka dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 25/1999 menyatakan: *“Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.”*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP No. 25/1999, yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan lelang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank Umum (Kepdir BI No. 32/1999), yang berbunyi sebagai berikut: *“Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam*

---

<sup>9</sup> .Siti Erlania, 2012 perlindungan hukum bagi nasabah bank. Makalah .serlania

*ayat (4), diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh ) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)."*

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 16 PP No. 25/1999, likuidasi bank dilakukan dengan cara:

1. Pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Menurut Peraturan LPS Nomor 02 tahun 2008, Tindak Lanjut Pencabutan Izin Usaha, Tim Likuidasi, Pembubaran Badan Hukum Bank, Penyelesaian Kewajiban kepada Pegawai Bank. Pemberesan Aset dan Kewajiban Bank, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi Bank, Pengakhiran Likuidasi Bank, Pertanggung Jawaban Tim Likuidasi adapun Contoh bank yang dilikuidasi, berdasarkan rekomendasi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Bank Summa tahun 1992 16 bank tahun 1997 penanganan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) bahwa kenyataannya sekitar kurang lebih 54 bank dengan kategori Bank Beku operasi (BBO)

Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali secara utuh kepada pemiliknya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam hal pengaturannya pun mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 1132

KUH Perdata. Hal tersebut membuat pemerintah berpikir dan berupaya mengeluarkan suatu pengaturan baru, lalu dikeluarkan peraturan baru tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dalam urutan pembayaran kewajiban bank, nasabah penyimpan dana lebih diutamakan dan mendapat tempat yang lebih tinggi dari kreditur lainnya. Dalam KUH Perdata yaitu pasal 1133 jo pasal 1134 kreditur terdiri dari kreditur preferen dan kreditur konkuren di mana kreditur preferen mendapatkan kedudukan sebagai pemegang hak yang diutamakan dari pada kreditur konkuren dan kreditur-kreditur lainnya. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 ini terdapat pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan urutan-urutan prioritas penerima pembayaran kewajiban bank kepada kreditur-krediturnya dan nasabah penyimpan dana akan mendapat prioritas dalam pembayaran kewajiban bank lebih utama dibandingkan dengan kreditur lainnya.

## Simpulan

Bertitik tolak dari penjabaran sebagai hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan antara lain : *Pertama* Di Indonesia sekitar tahun 1980 hingga tahun 2018 cukup banyak bermunculan bank dalam kegiatan perekonomian dan keuangan yaitu sekitar 128 buah bank, yang dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus dan lancar sebagaimana yang diharapkan sehingga mengalami bank bermasalah, baik mengenai bank maupun mengenai nasabah bank. Khusus yang berkaitan dengan bank banyak yang

mengalami masalah yaitu dengan tidak mempunya bank itu mengembalikan dana simpanan dari nasabah (penyimpan) sehingga mendatangkan kerugian bagi nasabah penyimpan dana pada bank tersebut, sehingga langkah yang di ambil oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuaangan, Direktur Bank Indonesia, LPS, BPPN dan pihak terkait lainnya mengambil beberapa langkah misalnya; melakukan penyehatan bank, melakukan merjer dan pembubaran, penghapusan bank (likuidasi). *Kedua* Dalam hal terjadinya likuidasi bank maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana adalah bersifat administratif sebagaimana di atur dalam UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan bersifat materil yuridis artinya diupayakan sedapat mungkin untuk mengembalikan seluruh dana simpanannya atau tidak mengurangi juga hak hak nasabah lainnya dengan cara mengembalikan modal para nasabah secara cermat dan akurat oleh pihak terkait, dan tidak ada satupun pihak nasabah yang tidak mendapatkan kembali dananya tentunya dengan membagi rata sesuai dengan jumlah dana yang nasabah simpan dengan berpedoman pada undang undang dan peraturan yang berlaku lainnya perlindungan hukum nasabah cukup kuat tinggal nasabah menggunakan sarana hukum itu secara baik melalui UU No. 8 tahunj 1999 tentang perlindungan konsumen maupun KUHPerdara (BW) yang yang berkaitan perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi, privilege, dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

- Komaruddin, 1994, *Kamus Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta Indonesia hal. 20.
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar perbankan*, CV.ARMICO. Bandung:Indonesia, hal 8
- Irwansyah, (2021) *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal 133-152
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal 237
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 78
- Hermansyah, 2009, *Hukum perbankan nasional Indonesia*, Edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Indonesia. Hal. 7.
- Suhardi, G.(2003) *usaha perbankan dalam perspektif Hukum*.Cetakan V. Penerbit Kanisius. Yogyakarta: hal 21.
- Siti Erlania, 2012 *perlindungan hukum bagi nasabah bank*. Makalah .serlania